

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:  
**Endra Setiawan**  
NPM. 15.0102.0062

**PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:  
**Endra Setiawan**  
NIM. 15.0102.0062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2020**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endra Setiawan  
NIM : 15.0102.0062  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 4 Februari 2020

Peneliti



Endra Setiawan  
15.0102.0062

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Endra Setiawan  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Magelang, 15 November 1997  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Soronalan, Soronalan, Sawangan  
Magelang  
**Alamat Email** : [Indrasetiawan66017@gmail.com](mailto:Indrasetiawan66017@gmail.com)  
**Pendidikan formal** :  
**Sekolah Dasar** (2003-2009) : SD Negeri Soronalan 1  
**SMP** (2009-2012) : SMP Negeri 3 Sawangan  
**SMK** (2012-2015) : SMK Muhammadiyah Mungkid  
**Perguruan Tinggi** (2015-2020) : S1 Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Magelang

Magelang, 4 Februari 2020  
Peneliti



Endra Setiawan  
NIM 15.0102.0062

## **MOTTO**

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana akan membawamu ke surga  
(Imam Hasan Al-Basri)

Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki  
(Al Hikmah)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)”**”.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Wawan Sadyo Nugroho, S.E., M.Si selaku Ketua Progam Studi Akuntansi.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, AK selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ayah dan Ibu saya tercinta yang selama ini selalu memberikan do'a, semangat, dukungan, serta kasih sayang.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.

Magelang, 4 Februari 2020  
Peneliti



Endra Setiawan  
15.0102.0062

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan .....	iii
Riwayat Hidup .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori .....	12
1. Shariah Enterprise Theoriy (SET) .....	12
2. Kinerja Keuangan .....	16
3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	17
4. <i>Islamic Social Reporting</i> .....	26
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	28
C. Perumusan Hipotesis .....	31
D. Model Penelitian .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel .....	38
B. Data Penelitian .....	38
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	39
D. Metode Analisis Data .....	43
E. Pengujian Hipotesis .....	47



#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Sampel Penelitian .....	50
B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	50
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	54
D. Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
E. Hasil Pengujian Hipotesis .....	59
F. Pembahasan .....	64

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Keterbatasan Penelitia .....	70
C. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Laba Perbankan Syariah di Indonesia .....	2
Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Sampel Penelitian .....	51
Tabel 3.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	52
Tabel 3.3 Uji Normalitas Data .....	55
Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 3.5 Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 3.6 Uji Heteroskedastisitas, Uji <i>Glejser</i> .....	58
Tabel 3.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi .....	58
Tabel 3.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60
Tabel 3.9 Hasil Uji F.....	61
Tabel 3.10 Hasil Uji t.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	37
Gambar 3.1 Uji F .....	48
Gambar 3.2 Uji t Penerimaan Hipotesis Positif .....	49
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F .....	60
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Variabel DD.....	61
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Variabel DKI.....	62
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Variabel DPS .....	62
Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji t Variabel KA.....	63
Gambar 4.6 Nilai Kritis Uji t Variabel ISR .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar BUS yang Terdaftar di OJK .....	76
Lampiran 2 Daftar Sampel Data Penelitian .....	76
Lampiran 3 Perhitungan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) .....	77
Lampiran 4 Perhitungan <i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR) .....	79
Lampiran 5 Perhitungan <i>Qard and Donation</i> .....	81
Lampiran 6 Perhitungan <i>Employees Expense</i> .....	83
Lampiran 7 Perhitungan <i>Net Profit</i> .....	85
Lampiran 8 Perhitungan <i>Equitable Distribution Ratio</i> (EDR) .....	86
Lampiran 9 Perhitungan Pendapatan Halal (PH) .....	88
Lampiran 10 Perhitungan <i>Islamicity Financial Performance Index</i> .....	90
Lampiran 11 Perhitungan Dewan Komisaris Independen .....	91
Lampiran 12 Hasil Tabulasi Data .....	93
Lampiran 13 Item <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) .....	95
Lampiran 14 Perhitungan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) .....	97
Lampiran 15 Hasil <i>Output</i> Statistik Deskriptif .....	98
Lampiran 16 Hasil <i>Output</i> Uji Asumsi Klasik .....	99
Lampiran 1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	100
Lampiran 16 Uji $R^2$ , Uji F, Uji t .....	101
Lampiran 17 Tabel <i>Durbin Watson</i> (DW) .....	102
Lampiran 18 Tabel Uji F .....	104
Lampiran 19 Tabel Uji t .....	105

## ABSTRAK

# **PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

**(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)**

**Oleh:**

**Endra Setiawan**

Penelitian ini menguji secara empiris mengenai pengaruh Mekanisme *Good corporate governance* dan *Islamic social reporting* terhadap kinerja keuangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Islamicity Financial Performance Index*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good corporate governance* yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit sedangkan *Islamic social reporting* diukur dengan *Islamic social reporting index*. Populasi penelitian adalah 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2014-2018. Berdasarkan metode *purposive sampling*, 10 BUS menjadi sampel penelitian dan jumlah pengamatan 50 sampel yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara 2014-2018. Data dipilih dari laporan keuangan perusahaan dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit dan *Islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, *Islamicity Financial Performance Index*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, *Islamic Social Reporting*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini total nasabah perbankan syariah mencapai 22 juta jiwa, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Namun *market share* bank syariah di Indonesia masih di angka 5,57% dari total aset secara keseluruhan perbankan ([www.infosyariah.com](http://www.infosyariah.com)). Dalam beberapa penelitian, faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah belum tercapai maksimal salah satunya adalah karena belum diimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara penuh dan sesuai dengan *shariah compliance*. Terdapat masalah dalam pengelolaan tata kelola (*governance*) di perbankan syariah (Riset Infobank).

Salah satunya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas tidak berjalan dengan baik, kebanyakan DPS datang hanya seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali. Pada dasarnya keadaan DPS yang seperti ini menjadikan banyak permasalahan pada perbankan syariah yang kemudian banyak para nasabah menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (Kompasiana.com). Salah satu faktor dalam mengukur kinerja sebuah bank syariah adalah dengan melihat seberapa tinggi tingkat penerapan prinsip syariah pada bank itu sendiri.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Laporan ini sangat berguna, terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank tersebut. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan.

Analisis rasio keuangan merupakan cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan, dengan menggunakan analisis rasio ini dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank. Bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengukuran kinerja lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya berbeda dari perusahaan lain, terutama pada sisi orientasi. Hameed, *et al*, (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran

kinerja untuk *Islamic banks*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Dalam penelitian ini hanya menggunakan *Islamicity Performance Index*, indeks inilah yang selanjutnya digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah (Harianto & Syafruddin, 2013).

Pertumbuhan perbankan syariah ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah. Selain itu pertumbuhan kinerja perbankan syariah juga dapat dilihat dari peningkatan laba dari tahun ke tahun. Berikut ini data perkembangan laba Bank Umum Syariah secara umum selama tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Laba Perbankan Syariah 2014-2018**

Tahun	Pertumbuhan Laba Perbankan Syariah Di Indonesia (%)
2014	-41,44%
2015	57,91%
2016	19,23%
2017	48,32%
2018	50,46%

*Sumber data sekunder yang diolah 2019, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)*

Pertumbuhan laba perbankan syariah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan laba tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat baik, akan tetapi tahun 2016 mengalami penurunan laba menjadi 19,23%. Meskipun tahun 2017 dan tahun 2018 kembali mengalami peningkatan ke arah yang positif, namun hal ini menjadi sorotan bahwa naik turunnya laba pada perbankan syariah dapat disebabkan oleh



aktivitas interanal perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga mampu mempengaruhi kinerja dari perbankan syariah tersebut.

Pertumbuhan kinerja perbankan syariah yang belum ke arah yang positif tersebut, menjadikan perbankan syariah senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Menurut Reni *et al.*, (2014) perkembangan kinerja perbankan syariah yang hanya dinilai dari pertumbuhan aset dan *market share* saja, menjadikannya tidak berbeda dengan perbankan konvensional sebagai organisasi yang berorientasi pada laba. Penilaian kinerja perbankan syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah islam.

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran, dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah (Jumansyah & Syafei, 2013).

Bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia perbankan juga dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan disempurnakan dalam

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Penerapan GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan GCG pada bank syariah menjadi sangat penting, dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agustin, 2014). Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia, menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Ausat (2018) serta Hisamuddin dan Tirta (2011). Namun dalam penelitian Farida *et*

*al*, (2017) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ausat (2018) tentang pengaruh hubungan *corporate governance* dan kinerja keuangan pada bank Islam, menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Manik (2011) serta Budiman (2017). Namun, dalam penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan..

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah, menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan syariah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Muttakin dan Ullah (2012), serta Sunarwan (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pegawai syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2018) tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Manik (2011) serta Desiana *et al.*,

(2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Perbankan syariah saat ini juga dituntut oleh masyarakat untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya pada laporan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Yuliani (2016) menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki berbagai tingkat dalam kuantitas dan kualitas dalam mengungkapkan item pengungkapan. Informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tanggung jawab sosial merupakan item yang paling penting diungkapkan oleh suatu perusahaan (Nugraheni dan Anuar, 2014).

Terkait dengan adanya tuntutan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut, *islamic social reporting* telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. *Islamic social reporting* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berkembangnya *islamic social reporting* diiringi dengan berkembangnya *islamic social reporting indeks* (Ahzar dan Trisnawati, 2015). Pengungkapan *islamic social reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan, dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Andraeny dan Putri (2017) tentang pengaruh *islamic social reporting*, berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Nursyarifah (2017) serta Listyana dan Violita (2016) menunjukkan bahwa *islamic social reporting* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan menggunakan *Profit Sharing Ratio*. Namun penelitian yang dilakukan Akbar dan Firli (2016) menyatakan bahwa *islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Eksandy (2018) dengan persamaan menggunakan semua variabel. Sedangkan perbedaannya adalah **Pertama**, menambahkan variabel *Islamic Sosial Reporting (ISR)*, untuk meneliti pengaruh ISR terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, berdasarkan *syariah enterprise theory* ISR yang diungkapkan dalam annual report akan memberikan sinyal positif atau tanda kepada investor bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik serta memiliki kinerja yang baik. *Islamic Sosial Reporting (ISR)*, salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dampak dari pelaksanaan pertanggung jawaban sosial adalah meningkatkan reputasi, kepercayaan institusi keuangan dan penurunan risiko yang berakibat pada peningkatan kinerja keuangan pada suatu perusahaan (Saleh et al., 2011).

**Kedua**, periode penelitian, yaitu pada tahun 2014 sampai 2018, karena pertimbangan bahwa periode tersebut merupakan periode terkini dari kondisi pasar modal, penelitian diharapkan menghasilkan penelitian yang up to date.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah *islamic social reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamic social reporting* terhadap kinerja keuangan.

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **1. Teoritis**

Melalui hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bank syariah di Indonesia untuk mengukur kinerja keuangannya

## **2. Praktis**

Memberikan manfaat kepada investor, kreditor, analisis, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pengukuran kinerja keuangan bank syariah dan sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pemikiran akuntansi syariah yang memenuhi aspek syariah

## **E. Sitematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Bab tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis terdiri dari landasan teori mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian

terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

### BAB V KESIMPULAN

Bab kesimpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. *Shariah Enterprise Theory* (SET)

*Shariah Enterprise Theory* (SET) merupakan teori yang berdasarkan pada *Stakeholder Theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1983). SET merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban kinerja tidak hanya pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Tujuan *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak dan membawa manfaat (*kemaslahatan*) bagi *stakeholders*, *shareholders*, masyarakat, lingkungan, dan perusahaan itu sendiri. *Shariah Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas.

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan *maslahah*), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia). Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas

yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2012) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2012).

Triyuwono (2012) menyatakan. Allah merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung akuntansi syariah tetap bertujuan pada kesadaran ke Tuhanan. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

*Stakeholder* kedua adalah manusia, adanya *direct-stakeholders* yaitu pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan. Kemudian adanya *indirect-stakeholders* yaitu pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik secara keuangan maupun non keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

*Stakeholders* yang terakhir adalah alam, yaitu alam sebagai pihak yang memberikan kontribusi bagi perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, dan memberikan jasa kepada pihak lain. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana diinginkan oleh manusia, melainkan dengan pelestarian alam dan pencegahan pencemaran alam. Sehingga SET menempatkan Allah sebagai pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta.

Secara implisit dapat kita pahami bahwa *Sharia Enterprise Theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Sharia Enterprise Theory* menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. (Triyuwono, 2012).

Konsep dari *Shariah Enterprise Theory* (SET) menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah, terkait dengan penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan dari penerapan *shariah*

*compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agustin, 2014). Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Beberapa pendukung lain dalam penerapan *shariah compliance* yaitu yang pertama, dewan direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Kedua, dewan komisaris independen yang secara signifikan menjunjung tinggi kepentingan semua *stakeholder* dan bertindak secara independen cenderung lebih bisa mengontrol perusahaan untuk patuh dengan *shariah compliance*. Ketiga, komite audit yang bekerja secara independen akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan, selain itu komite audit lebih mengarah pada pengawasan laporan keuangan yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dan lebih bisa sesuai dengan *shariah compliance*.

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga dapat memberikan dampak pada kinerja perusahaan, karena semakin banyak tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perbankan, maka dapat memberikan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat sehingga akan lebih banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi nasabah dan mempercayai akan kinerja yang

dilakukan oleh perbankan syariah, yang nantinya mampu mempengaruhi kinerja keuangan syariah itu sendiri.

## **2. Kinerja Keuangan**

Pencapaian keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar (Sari, 2010). Kinerja keuangan merupakan indikator dalam menilai kondisi keuangan perusahaan yang diantaranya diukur dari profitabilitas. Dengan menilai kinerja maka dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Kekuatan tersebut kemudian dipahami agar dapat diambil manfaatnya dan perusahaan bisa mengambil langkah dalam memperbaiki kelemahan yang ada (Kusumo, 2008 dalam Meilani, 2015).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasional untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi sering kali dipengaruhi oleh periode metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangan pada periode tertentu. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dapat dijadikan prediktor kondisi perusahaan di masa yang akan

datang dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Prasojo, 2015).

### **3. *Good Corporate Governance***

*Good corporate governance* (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Persoalan tata kelola dalam bank syariah berbeda dengan tata kelola dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (syariah) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah (Sudaryati & Eskadewi, 2012).

*Good Corporate Governance* menurut *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) dalam Sunarwan (2015) adalah struktur yang mengatur para pemegang saham, komisaris dan manajer

dalam menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta mengawasi kinerja.

Peraturan tentang *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah terdapat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tahun 2009 yang menekankan perlunya penerapan (*GCG*) pada perbankan, yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan (*GCG*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan (*GCG*) yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam (PBI) ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Peraturan *GCG* pada perbankan syariah memperjelaskan bahwa pelaksanaan *GCG* di dalam industri perbankan syariah berbeda dengan pelaksanaan *GCG* di perbankan konvensional, yaitu pelaksanaan *GCG* perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). *Sharia compliance* merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya mengikuti tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001).

Menurut Cadbury (1992), *GCG* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Akbar (2015), memaparkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi)

Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktek bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah diakses dan mudah dipahami bagi *stakeholder*. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum



dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lain untuk pembuatan keputusan. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder*.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi hukum dan aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder* juga kepada *stakeholder* lainnya.

4. *Independensi* (Kemandirian)

Untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau *intervensi* dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### 5. *Fairness* (Kewajaran)

Untuk melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan prinsip kewajaran. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *takeholder* sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *Fairness* dapat menjadi factor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Selain prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut, *good corporate governance* juga mempunyai manfaat dan tujuan yang dapat memberikan kerangka acuan, memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Sari (2010) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders's value* dan deviden.

**a. Dewan Direksi**

Menurut media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan ikut meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtiyas,2011)

Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang 3

(tiga) orang dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

**b. Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Jumlah komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

Sedangkan menurut peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersifat independen. Tugas dari komisaris independe

adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

**c. Dewan Pengawas Syariah**

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam (Harahap, 2002).

Sedangkan menurut Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervise/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI Kep-98/MUI/III/2001, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dewan pengawas syariah mempunyai peran penting dalam mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kemudian, dewan pengawas syariah juga harus membuat pernyataan secara berkala bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, dewan pengawas syariah bersama komisaris dan direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.

**d. Komite Audit**

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut senada dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Frimsstat (2009) komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan

komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Menurut *Sarbanes-Oxley act* yang dikutip Sutojo dan Aldridge (2005) dalam Mulyati (2011) jumlah anggota komite audit perusahaan mengharuskan bahwa: “komite audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan tanggung jawab komite audit pada umumnya pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)
- b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
- c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

#### **4. *Islamic Social Reporting***

*Islamic Social Reporting* (ISR) adalah ukuran yang digunakan oleh para peneliti untuk menilai seberapa besar pengungkapan tanggungjawab sosial menurut pandangan syariah. Tanggungjawab sosial (CSR) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas perusahaan terutama untuk perbankan syariah yang beroperasi dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah (Astuti, 2014).

Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, Widiawati (2012). Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka khusus tersebut adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*, dimana *Islamic Social Reporting* tersebut menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002).



Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulas Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Eksandy (2018)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Indonesia.	Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Ausat (2018)	The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks.	Ukuran dewan direksi, dan dewan independen berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam
3	Fransisca (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank Syariah.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulas Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Penelitian	Judul	Hasil
4	Andraeny, dan putri (2017)	<i>Islamicity financial performance index in Indonesian islamic banks.</i>	<i>islamic social reporting, intellectual capital</i> dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan syariah.
5	Budiman (2017)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan bank syariah.	Dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
6	Farida <i>et al</i> (2017)	<i>The effect of good corporate governance on financial performance in shariah commercial banks in Indonesia.</i>	Aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, aktivitas dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
7	Hassan, <i>et al</i> (2017)	Variabel independen: <i>corporate governance</i>  Variabel dependen: kinerja bank Islam	Ukuran dewan direksi dan dewan independen memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank Islam
8	Nursyarifah (2017)	Pengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.	DPK, FDR, dan ISR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
9	Desiana <i>et al</i> (2016)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap profitabilitas (ROE) pada bank Indonesia.	<i>Good corporate governance</i> terhadap variabel profitabilitas berpengaruh positif.

**Table 2.1**  
**Rekapitulas Penelitian Terdahulu**  
**(Lanjutan)**

No	Penelitian	Judul	Hasil
10	Akbar dan Firli (2016)	Pengaruh <i>islamic social reporting</i> terhadap kinerja keuangan bank syariah.	<i>Islamic social reporting</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.
11	Sunarwan (2015)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perbankan syariah.	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
12	Listyana dan Violita (2014)	Analisis pengaruh <i>islamic social reporting</i> terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia	<i>Islamic social reporting</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>profit sharing ratio vs non-islamic income</i> .
13	Hisamuddin dan Tirta (2011)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.	Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan syariah.
14	Manik (2011)	Analisis pengaruh kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, umur perusahaan terhadap kinerja keuangan.	Kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan kepemilikan instansi tidak berpengaruh signifikan.

*Sumber: Penelitian sebelumnya*

## C. Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

#### a) Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Aprianingsih dan Yushita (2016) dewan direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menentukan arah strategis, menetapkan kebijakan, operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Dewan direksi bukan merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan arah kebijakan oprasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan.

Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* menyatakan bahwa dewan direksi akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang dengan penuh kehati-hatian dan pertanggungjawaban kepada Allah sehingga kinerja perusahaan menjadi baik. Jumlah dewan direksi yang besar akan menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *Resources Dependence*, semakin besar kebutuhan yang menghubungkan

eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan direksi dalam jumlah besar akan semakin tinggi (Fauzi, 2016).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), Ausat (2018), serta Hisamuddin dan Tirta (2011), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1.a Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan*

**b) Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisari yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendalian, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, atau hubungan keuangan dan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak Independen, Amri (2011). Menurut PBI-2009, dewan komisaris independen anggotanya tidak dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Proporsi minimum dewan komisaria independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan Komisaria independen diangkat melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* menyatakan bahwa peran komisaris independen berperan menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kualitas laporan keuangan yang didasarkan pada kehati-hatian dan pertanggungjawaban kepada Allah, sehingga kinerja perusahaan menjadi baik. Menurut Mulyadi (2016) menyatakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ausat (2018), Manik (2011), serta Budiman (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H1.b Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan***

**c) Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Sunandar (2005) dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan *supervise* atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan konsep *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa hubungan antara pemberi amanah dan yang memberi amanah. Perbankan Syariah memerlukan dewan pengawas syariah dalam kegiatan operasional usaha untuk mengawasi kepatuhan

akan prinsip-prinsip syariah yang dijalani. Atau dengan kata lain dewan pengawas syariah sebagai dewan yang mengawasi aktivitas perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah telah mematuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena pertanggung jawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah peran dewan pengawas syariah ini untuk menentukan kehalalan dan kesesuaian produk dan jasa keuangan entitas dengan prinsip-prinsip syariah sehingga meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017), Muttakin dan Ullah (2012), serta Sunarwan (2015), dalam penelitiannya membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H1.c Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan***

#### **d) Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam

pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

Berdasarkan konsep *Shariah Enterprise Theory* komite audit bertugas memantau penerapan *Good corporate governance* yang dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar sebagai muslim untuk menjalankan syariah islam secara utuh dan sempurna. Dengan keyakinan kepada Allah maka *Good Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel, sehingga kinerja keuangan akan semakin baik. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, sehingga peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai kinerja perusahaan (Sunarwan, 2015).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Manik (2011), Desiana *et al*, (2017) Fransisca (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H1.d Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan***



## 2. Pengaruh *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan

*Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perpanjangan dari pelaporan sosial yang tidak hanya meliputi ekspektasi luas dari masyarakat terkait peran perusahaan pada sisi ekonomi tetapi juga pada sisi spiritual (Haniffa, 2002).

Pelaporan sosial sebagai proses memberikan informasi yang di desain untuk melaksanakan akuntabilitas sosial. Konsep akuntabilitas sosial berkaitan dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Selain itu, ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

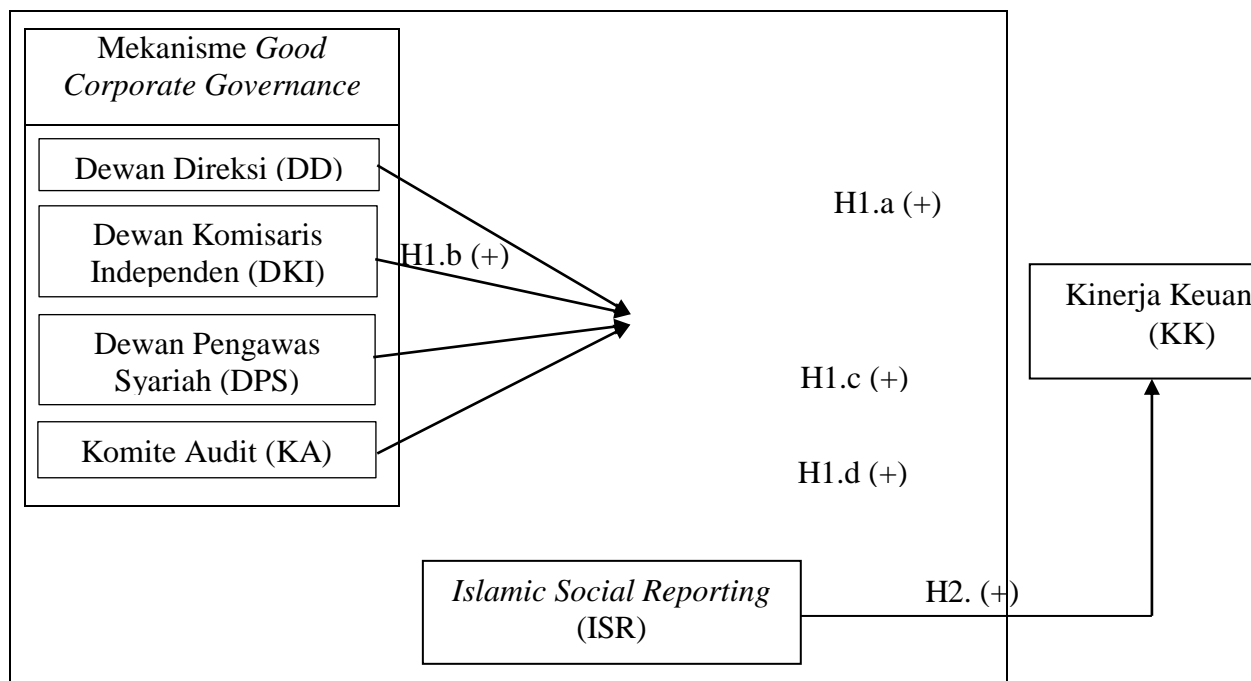
*Shari'ah enterprise theory* mengedepankan nilai keseimbangan antara tiga stakeholdes yaitu Allah, manusia, dan lingkungan alam, maka perusahaan bertanggungjawab untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban sosial terhadap *stakeholdes* yang luas. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap Allah sebagai *stakeholders* tertinggi, manusia sebagai *stakeholders* yang memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung, dan lingkungan alam sebagai tempat berusaha melakukan segala aktivitasnya. Secara khusus ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam

perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursyarifah (2017), Listyana dan Violita (2016), serta Andraeny dan putri (2017) menyatakan bahwa *islamic social reporting* berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2. *Islamic social reporting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan***

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2014 – 2018.
2. Menyajikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2014 sampai 2018.
3. Menyajikan laporan *good corporate governance* selama tahun 2014 sampai 2018.
4. Menyajikan laporan *islamic social reporting* tahun 2014 sampai 2018.

#### **B. Data Penelitian**

##### **1. Jenis dan sumber data penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disajikan oleh bank syariah Indonesia dan dipublikasikan pada *website* masing-masing bank.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai objek penelitian. Adapun periode penelitian adalah periode 2014-2018.

## **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau laporan tahunan (*annual report*) dari masing-masing perusahaan sampel yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

### **1. Variabel Dependen (Terikat)**

#### **a. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan (Wardhani, 2008). Pengukuran kinerja keuangan bank syariah diukur menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* yang terdiri dari enam indikator yaitu *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, *AAOIFI Index*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*. *AAOIFI Index* tidak digunakan dalam penelitian ini karena indeks tersebut dianggap tidak berpengaruh terhadap agregat pengukuran

kinerja total, rasio *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment* tidak digunakan karena tidak dapat ditelusur dalam laporan keuangan bank syariah (Meilani dkk, 2014). Berikut adalah *Islamicity Financial Performance Index* (Hameed dkk, 2004).

a. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

$$\mathbf{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

$$\mathbf{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Assets}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

$$\mathbf{EDR} = \text{Qard and Donation} + \text{Employee Expenses} + \text{Net Profit}$$

1. *Qard and Donation*

$$\mathbf{Qard\ and\ Donation} = \frac{\text{Pinjaman dan Sumbangan}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

2. *Employees and Expenses*

$$\mathbf{Employees\ and\ Expenses} = \frac{\text{Beban tenaga kerja}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

3. *Net Profit*

$$\mathbf{Net\ Profit} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

d. *Islamic Income vs Non-Islamic Income* (PH)

$$\mathbf{PH} = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

## 2. Variabel Independen (Bebas)

### a. *Good Corporate Governance*:

#### 1) Dewan Direksi

Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mengelola perusahaan (Hisam & Tirta 2012). Diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan (Sunarwan, 2015)

$$DD = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

#### 2) Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau tidak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Hisam & Tirta 2012). Perhitungan dewan komisaris independen dilakukan dengan menghitung persentase dewan komisaris independen yang terdapat dalam dewan komisaris (Ausat, 2018).

$$DKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

#### 3) Dewan Pengawas Syariah

Lembaga Independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat. Atau merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank Syariah (Chabibatillah, 2016). Perhitungan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan menghitung jumlah dewan pengawas syariah

perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (Ausat, 2018).

**DPS** = Jumlah Dewan Pengawas Syariah

#### **4) Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris, serta bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit dalam kurun waktu satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan (Baxter, 2010).

**KA** = Jumlah Pertemuan Komite Audit

#### **b. *Islamic Social Reporting***

*Islamic Sosial Reporting* (ISR), salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mendeskripsikan pengungkapan sosial digunakan analisis konten (*content analysis*). Dalam analisis konten peneliti akan menjumlahkan keberadaan teks, kemudian membuat penafsiran tentang pesan didalam teks yang berupa informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perbankan syariah yang dijadikan sampel penelitian. Dari laporan tahunan perbankan syariah kemudian akan dilakukan *scoring* atau *coding* terhadap tema-tema yang telah ditetapkan. Masing-masing

item akan diberi nilai 1 jika item diungkapkan oleh perusahaan, dan diberi nilai 0 jika tidak diungkapkan. Setelah melakukan *scoring* pada sampel kemudian dilakukan perhitungan tingkat pengungkapan dengan menjumlahkan skor ISR pada seluruh dimensi kemudian membaginya dengan total item pada *checklist* ISR. Tema dan dimensi indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ethical Identity Index* (EII) yang dikembangkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007). Berikut rumus untuk menghitung indeks ISR:

$$\text{ISR Index} = \frac{\text{Jumlah unsur ISR yang diungkapkan}}{\text{Total unsur dalam checklist ISR}}$$

#### **D. Metode Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Ghozali (2018:19) menyatakan, “Deskripsi suatu data yang diberikan oleh statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, jumlah (*sum*), range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi)”. Tujuan pengujian ini adalah untuk mempermudah pembaca memahami variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini sehingga meminimalkan kesalahan pembacaan variabel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif berupa nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

##### **2. Uji Asumsi Klasik**

###### **a. Uji Normalitas**

Ghozali (2018:161) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual atau variabel



pengganggu memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilakukan dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-Score* dan diasumsikan normal. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah:

- 1) Terjadi perbedaan signifikan (data tidak normal) apabila nilai signifikansi  $< 0,05$ .
- 2) Tidak terjadi perbedaan signifikan (data normal) apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ .

b. Uji Multikolinearitas

Sebuah model regresi diperlukan pengujian untuk mengetahui variabel-variabel independen memiliki hubungan yang tinggi. Pengujian ini disebut uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dasar

pengambilan keputusan uji multikolinearitas ini menggunakan nilai *tolerance* dan nilai VIF.

1. Melihat nilai *tolerance*

- a) Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance*  $> 0,10$ .
- b) Terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $0,10$ .

2. Melihat nilai VIF (*variance inflation factor*)

- a) Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF  $< 10,00$ .
- b) Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF  $> 10,00$  atau sama dengan  $10,00$ .

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111). Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *durbin watson* (DW *test*). Uji *durbin watson* merupakan uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *durbin watson* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$ , maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

- 3) Jika  $d$  terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018:137). Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glesjser. Uji *glesjser* dapat dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* adalah:

- 1) Tidak terjadi heterokedastisitas jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ .
- 2) Terjadi heterokedastisitas, jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ .

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda. Analisis linear berganda digunakan karena variabel independen penelitian ini lebih dari satu. Analisis linear berganda merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel indepeden terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$KKBS = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 DKI + \beta_3 DPS + \beta_4 KA + \beta_4 ISRE$$

Keterangan:

KK	= Kinerja Keuangan
DD	= Dewan Direksi
DKI	= Dewan Komisaris Independen
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
KA	= Komite Audit
ISR	= <i>Islamic Social Reporting</i>
A	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien variabel
$\varepsilon$	= <i>Error</i> atau Residual

## E. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

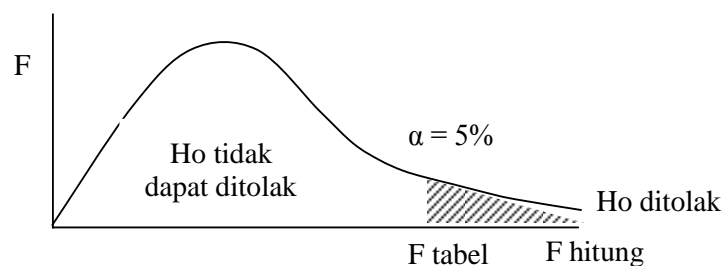
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

- a) Jika dalam uji empiris di dapat nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka  $adjusted R^2 = R^2 = 1$ .
- b) Sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka  $adjusted R^2 = (1 - k) / (n - k)$ . Jika  $k > 1$ , maka  $adjusted R^2$  akan bernilai negatif.

## 2. Uji F (Goodness of Fit Test)

Ghozali (2018:97) menyatakan bahwa uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan oleh *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $(df) = n - k - 1$ .  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- a) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p\ value < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Artinya model yang digunakan bagus atau *fit*.
- b) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p\ value > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Artinya model yang digunakan tidak bagus atau tidak *fit*.

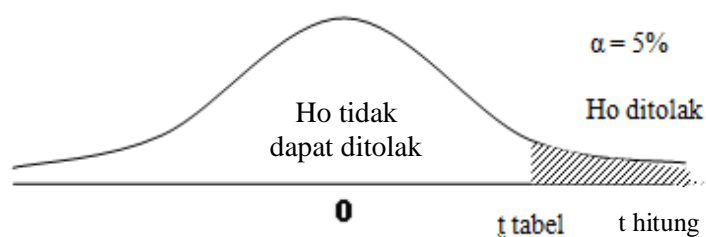


**Gambar 3.1**  
**Penerimaan Uji F**

### 3. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2018:98). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan  $df = n - 1$  yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Adapun kriteria uji t yaitu:

- a) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $p\ value < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $p\ value > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak, dan  $H_a$  tidak dapat diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
Penerimaan Hipotesis Positif Uji t

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Objek pada penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2014-2018. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 10 bank syariah dengan jumlah sampel sebanyak 50. Temuan hasil penelitian ini adalah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit dan *Islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### B. Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS), sehingga memungkinkan perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Jangka waktu penelitian hanya lima tahun (2014-2018).
2. Pengukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas jumlah DPS yang berada di bank.
3. Komite yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan komite audit saja.

### **C. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) tetapi dapat menambah Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangka waktu penelitian, agar hasil penelitian dapat tergeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel komite manajemen risiko agar lebih representatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar and Trisnawati. 2015. “*Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia.*” *Proceeding Seminar Nasional Dan Call for Papers Sancall, Surakarta.*
- Akbar, Taufik. 2015. “*Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pegungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.*” *Skripsi. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Halaman 30 – 5.*
- Akbar, N., Rikumahu, B., & Firli, A. (2016). *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014).* *E-Proceeding of Management ISSN: 2355-9357, 3(2), 977–985.*
- AAIlgifari. 2003. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis.* Edisi Kedu. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Amri, Gusti. 2011. *Komisaris Independen dan GCG.*
- Andraeny and Putri Diana. 2017. “*Islamicity Financial Performance Index in Indonesian Islamic Banks.*” *Journal of Economics and Business.*
- Astuti, Tri Puji. 2014. “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Di Indonesia.*” *Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halaman 1 - 15.*
- Ausat, Syed Amaar Ali. 2018. *The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks.* *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 19(2).*
- aydoun, N and Roger Willet. 1994. *Islamic Accounting Theory.* The AAANZ Annual Conference.
- Baxter, P. 2010. *Factor Associated with The Quality of Audit Committees.* *Pacific Accounting Review, 22(1).*
- Budiman, arif. 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan bank syariah.* Skripsi. Surakarta. Progam Sarjana Ekonom Universitas Surakarta.
- Cadbury, Committee. 1992. “*Report of The Financial Aspects of Corporate Governance.*” London, Gee.
- Chabibatillah, Diyanah Fithriyah. 2016. “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kemampuan Labaan Perbankan Syariah Di Indonesia.*” *Skripsi:*

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Desiana, Lidia, Mawardi, Sellya Gustiana. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governanc Terhadap Provitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. Jurnal I Finance. Vol.2 No.2.*
- Eksandy, Arry. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia."
- Farida, Yuliani, Nur Laila, and Puput Ani Gunarti. 2017. "The Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance in Shariah Commercial Banks in Indonesia."
- Fransisca, Vinda. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*
- Firmstat. 2009."komite audit tp:Firmsstat.Blogspot.Com/2009/05/Komiteaudi. Html. (1Febuari 2012)."
- Fauzi, Achmad Noor. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governence Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)." *Skripsi Surakarta: IAIN.*
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, S, et al. 2004. *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank. International Islamic University Malaysia.*
- Hameed, Shahul. Wirman, Ade. Alrazi, Bakthiar. Nor Mohd Nazli bin Mohamed. Pramono, Sigit. 2014. *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks. 2 International Convergence on Administrative Science, King Fahd Universitas Of Petroleum and Minerals.*
- Haniffa, Rahma. 2002. *Social Reporting Disclosure - An Islamic Perspective. Indonesian Management & Accounting Research. 1 (2), pp.128-146.*
- Haniffa, Rahma. and M. Hudaib. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76 : 97-116.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Auditing Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hassan, Muhammad, Muhammad Rizwan, Hafiz M. Sohail. 2017. *Corporate Governance, Shariah Advisory Boards, and Islamic Banks Performance. Pakistan Journal of Islamic Research, 18(1).*
- Hisamuddin, Nur dan Tirta Yayang M. 2011. *Pengaruh Good Corporate*

*Governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jembe*

<http://jdih.bumn.go.id>. “KEP-103/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2002”. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian BUMN*. Diakses tangg 22 Maret 2017.

<http://storage.jak-stik.ac.id>.”*Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009*”. Diakses tanggal 6 Juni 2017.

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-103/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.

Listyana, Bella Chintia and Evony Silvino Violita. 2014. “*Analisis Pengarus Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Perusahaan.*” Depok : Universitas Indonesia Hal 1 – 20.

Manik, Tumpal. 2011. “*Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Komisaris Independen, Komte Audit, Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Property & Real Estate Di BEI).*” Jurnal Vol 2.

Meilani, Sayekti E. R., Dita Andraeny, dan Anim Rahmayati. 2014. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.

Mulyadi, Roza. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi*. Vol.3. No.1 Januari 2016.

Mulyati, Siti Murni. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Semarang: ProgramSarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang.

Muttakin, M. dan M. S. Ullah. 2012. *Corporate governance and bank perfomance:Evidence from Bangladesh.Corporate Board: Role, Duties &Composition*. 8 (1): 62-68.

Nursyarifah, Hani Oktarina. 2017. *Pengaruh DPK, FDR dan ISR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah*. Skripsi. Lampung. Progam Sarjana Ekonomi Universitas Lampung.

Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K, 2009, “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia*”. *Research Journal of International Studies*.

- Purwaningtias, F. S. 2011. *Analisis pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2009)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Saleh, Muhamad. Zulkifli, Nur dan Muhammad, R. 2011. *Looking For Evidence Of The Relationship Between Corporate Social Responcibility And Corporate Financial Performance In An Emerging Market. Asia-Pasific Journal Of Business Administration*. 3 (2), 165-190.
- Sari, Irmala. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional*. Skripsi. Semarang:Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- Sunarwan, Eko. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah*. Skripsi. Jakarta: Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri. Hal 61 – 65.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Ushul Fiqh*. Jilid 1, h. 1. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Tapanjeh, A. M. A. 2009. *Corporate Governance from the Islamic perspective: A Comparative analysis with OECD principles. Critical Perspective on Accounting*, 20, 556-567.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta : Raja Gratindo Persada.
- Wardhani, Ratna. 2008. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Hal: 1-26.
- Widiawati, Septi. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011*. Skripsi. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Halaman 44-47.
- Yuliani, Rahma Dwi. 2016. *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta. Hal 1 – 25.